

BAB III

Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan

Pertahanan negara bukanlah hal yang eksklusif. Meskipun Indonesia mengembangkan pertahanan yang mandiri dalam pengertian tidak menyandarkan kepentingan pertahanan pada negara lain, Indonesia tetap menganut prinsip menjalin hubungan dengan negara lain melalui kerja sama pertahanan. Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia terus mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia. Kepentingan Indonesia di bidang kerja sama pertahanan dengan negara lain di waktu-waktu akan datang semakin penting ditingkatkan, seiring dengan perkembangan isu-isu keamanan di lingkup regional dan global yang memerlukan penanganan bersama.

Kondisi harmonis hubungan politik luar negeri suatu negara, pada umumnya juga akan menyangkut pola-pola kerjasama militer antar negara bersangkutan, termasuk bantuan peralatan perang dan pelatihan personel. Sebaliknya juga akan menghadapi resiko terkena sanksi embargo dari negara produsen senjata bersangkutan, apabila terjadi perbedaan pandang dalam suatu peristiwa politik. Namun, hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan merupakan sebuah hubungan yang hampir tidak pernah terlibat dalam perselisihan, sehingga hubungan militer keduanya pun tidak mengalami masalah.

Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Dalam kaitan tersebut Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati kerja sama kegiatan di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerja sama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan juga telah lama mengembangkan kerja sama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan militer kedua negara berlangsung cukup baik; ini mengindikasikan bahwa hubungan pertahanan kedua negara semakin penting.

Bila kapabilitas pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dibandingkan, maka terlihat jelas bahwa Korea Selatan memiliki kapabilitas lebih tinggi daripada Indonesia, hal ini terlihat dari kepemilikan alutsista dan pengalokasian anggaran belanja pertahanan bagi angkatan bersenjataanya, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia lebih banyak daripada Korea Selatan. Selengkapnya lihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Kapabilitas Pertahanan Indonesia-Korea Selatan
(Tahun 2008)

	<u>Indonesia</u>	<u>Korea Selatan</u>
Total Population	237,512,352	48,379,392
Military Manpower Available	125,530,542	26,721,668
Fit for Military Service	104,496,911	21,966,367
Reaching Military Age Yearly	4,291,700	696,516
Active Military Personnel	316,000	687,000
Active Military Reserves	400,000	4,500,000
Active Paramilitary	207,000	22,000
Total Air-Based Weapons	313	538
Total Land-Based Weapons	2,122	8,325
Total Naval Units	111	85
Towed Artillery Systems	293	4,000
Merchant Marine Strength	971	812
Major Ports and Terminals	10	4
Aircraft Carriers	0	0
Destroyers	0	6
Frigates	15	9
Submarines	2	20
Patrol Coastal Craft	24	75
Mine Warfare Craft	12	15
Amphibious Operations Craft	26	28
Defense Budget / Expenditure	\$4,740,000,000	\$25,500,000,000
Foreign Reserves	\$56,920,000,000	\$262,200,000,000
Purchasing Power	\$843,700,000	\$1,206,000,000,000
Oil Production	837,500 bbl	17,050 bbl
Oil Consumption	1,100,000 bbl	2,130,000 bbl
Proven Oil Reserves	4,430,000,000 bbl	0 bbl
Total Labor Force	109,900,000	24,220,000
Roadway Coverage	391,009 km	102,062 km
Railway Coverage	6,458 km	3,472 km
Waterway Coverage	21,579 km	1,608 km
Coastline Coverage	54,716 km	2,413 km
Major Serviceable Airports	652	150
Square Land Area	1,919,440 km	98,480 km

Sumber: *Compare Countries Result*, diunduh dari <http://globalfirepower.com/countries-comparison.asp>

Faktor fundamental yang membedakan kedua negara adalah susunan demografis, sistem politik dan struktur ekonomi yang jauh berbeda. Walaupun secara umum sosok negara Korea Selatan dan Indonesia sangat berbeda, terdapat dua kemiripan dalam pengalaman sejarah keduanya, yaitu kolonialisasi oleh negara lain dan konfrontasi dengan komunisme. Warisan sejarah ini sangat berpengaruh dalam pembentukan cara pandang kedua negara terhadap dunia luar, perumusan politik luar negeri dan juga dalam penerapan hubungan luar negeri.¹

Sejalan dengan berlangsungnya hubungan diplomatik, hubungan kerjasama militer antara Indonesia dengan Korea Selatan pun berlangsung dengan harmonis. Dimulai pada tahun 1970-an, kedua negara saling mengirimkan atase militernya.² Pada tahun 1974 Korea Selatan menempatkan seorang atase militernya di Kedutaan Besar Republik Korea (KBRK) di Jakarta, sedangkan penempatan atase militer Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul baru dimulai pada tahun 1979.

Hubungan militer tersebut semakin meningkat sehingga pada tahun 1989 hingga 1997, Korea Selatan menunjuk pembantu atase militer untuk ditempatkan di KBRK di Jakarta.³ Selain itu, penempatan duta besar Indonesia di KBRI Seoul yang berasal dari latar belakang militer sedikit menunjang kelancaran hubungan militer kedua negara, disamping kebijakan TNI untuk tetap bersikap pro terhadap Korea Selatan walaupun Indonesia memegang kebijakan untuk menjalin hubungan hubungan diplomatic dengan kedua Korea (Korea Selatan dan Korea Utara). Berkembangnya hubungan kerjasama antara kedua pemerintah di bidang kemiliteran tersebut telah memberikan efek sinergis kepada sejumlah lapisan kenegaraan tidak hanya di bidang kerjasama perekonomian, tetapi juga bidang-bidang kerjasama kemasyarakatan lainnya.⁴

Selama tiga dekade terakhir Indonesia memiliki tiga pola yang berbeda dalam mendapatkan persediaan persenjataan.⁵ Pola yang pertama memiliki dua

¹ Yang Seung-Yoon, *Hubungan Bilateral Korea-Indonesia Pada Era Asia Timur: Sebuah Pembahasan Dalam Perspektif Globalisasi* (FISIP UI Press: 2004), hal. 4.

² *Ibid.*, hal. 12.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 13.

⁵ Makmur Keliat, *The Future Direction of Defense Cooperation*, hal. 2.

karakter utama, yakni Indonesia tidak mengalami penekanan biaya dalam pembelian peralatan militer dan Indonesia cenderung memiliki hubungan baik dengan negara-negara penyedia peralatan militer, pola ini berlangsung pada tahun 1980-an ketika Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Pola kedua juga ditandai dengan tidak adanya penekanan biaya belanja militernya, namun diikuti dengan tekanan politik dari negara-negara industri maju yang berbentuk embargo senjata (*arms embargoes*) yang dikarenakan oleh adanya isu pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, pola ini berlangsung dari tahun 1991 hingga awal tahun 1998 disaat Indonesia mengalami krisis finansial yang menyebabkan semakin sulitnya Indonesia mendapatkan peralatan senjata. Pola ketiga ditandai dengan tidak hanya berlanjutnya tekanan politik dari negara-negara utama penyuplai persenjataan (embargo), namun juga oleh semakin ditekannya biaya belanja militer oleh pemerintah sebagai dampak atas terjadinya krisis finansial yang melanda Indonesia.

Dampak krisis finansial yang dialami Indonesia pada tahun 1998 memberikan masalah yang serius dalam peningkatan postur pertahanannya, yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki kapabilitas militer lebih sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya (Lihat Tabel 3.2). Dan dengan kurangnya sumber finansial dan embargo militer yang diberikan oleh negara-negara maju membuat Indonesia harus melakukan inovasi kebijakan dalam penyediaan peralatan militernya dan salah satunya adalah berupa fasilitas kredit ekspor (*export credit facility*).⁶ Pemerintah Indonesia mendefinisikan mekanisme kredit ekspor tersebut sebagai bantuan luar negeri yang diberikan oleh institusi keuangan negara tertentu yang didukung oleh negara tertentu tersebut dimana bantuan tersebut digunakan untuk memperoleh barang dari negara donor itu. Dan rupanya dalam sektor pertahanan, mekanisme kredit ekspor tersebut meningkat dengan jumlah yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2000 hingga 2004 alokasi untuk sektor pertahanan naik dari US\$ 159.28 juta menjadi US\$ 448.41 juta.⁷ Mekanisme kredit ekspor ini menjadi langkah baru bagi Indonesia untuk

⁶ *Ibid.*, hal. 3.

⁷ *Ibid.*

meningkatkan industri pertahanannya karena itulah ide dengan melakukan kerjasama pertahanan dengan negara lain termasuk Korea Selatan menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya, secara spesifik di bidang pertahanannya.

Tabel 3.2

Tabel Singkat Kepemilikan Senjata pada Aspek-aspek Tertentu

	Submarine	Destroyer	Frigates	Aircrafts
<u>Asia Timur</u>				
Australia	6	-	13	145
China	57	27	44	2643
Jepang	18	45	9	300
Korsel	20	6	9	540
Taiwan	4	9	22	479
<u>Asia Tenggara</u> (Selected countries)				
Indonesia	2	-	12	94
Malaysia	-	4	82	-
Singapura	4	-	1	111
Thailand*	-	-	12	165

Dikutip dari: Edy Prasetyono, *Strategi Pertahanan Indonesia di Masa Depan*, Analisis CSIS Vol. 37, No. 3, September 2008. Thailand* mempunyai 1 kapal induk yang dibeli dari Spanyol. Data di atas tidak termasuk kapal jenis korvet.

III. 1. Sebelum Tahun 2006

Kerjasama di bidang pertahanan yang pernah terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam sebuah perjanjian pengaturan pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Republik Korea tentang penerimaan bersama jaminan mutu antar pemerintah untuk material dan jasa pertahanan (*Arrangement Between the Department of Defense and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea Concerning Mutual Acceptance of Government Quality Assurance of Defense Materiel and Services*) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1999.⁸

Selain itu ditandatangani pula *Letter of Intent* mengenai kerjasama spesifik di bidang industri pertahanan antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Korea (*Specific Defense Industry Cooperation Between the Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea*) pada tanggal 22 Desember 2000 di Jakarta.⁹

Dalam melakukan kerjasamanya, Indonesia dan Korea Selatan memiliki beberapa metode.¹⁰ Metode pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan mekanisme pinjaman (*loan mechanism*). Seperti yang terlihat dalam Tabel 3.3 bahwa Korea Selatan memainkan peranan yang penting dalam membantu Indonesia untuk memperoleh kebutuhan peralatan militernya. Selama lebih dari 10 tahun, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menerima lebih dari US\$ 130 juta dari pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman yang diberikan terutama diberikan dalam bentuk fasilitas kredit ekspor yang digunakan untuk pembelian sejumlah peralatan militer seperti truk, rompi anti-peluru, detektor ranjau, helm dan pesawat latihan KT-1.

⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Daftar Perjanjian Internasional (Korea Selatan)* dalam <http://www.deplu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/korea%20selatan.htm> diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 23:38 wib

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Makmur Keliat, *loc.cit.*, hal. 4.

Tabel 3.3
Pinjaman dari Korea Selatan yang Dialokasikan untuk Sektor Pertahanan
Indonesia (1999-2006)

Tahun	Jumlah Pinjaman	Bentuk Bantuan
1999	US\$ 7.615.226,50	PP & D7500 BHP OGT
2001	US\$ 29.251.984,53	P7 PLTD (KT 18) & ILS
2003	US\$ 3.481.717,30	Marine Utility Vehicles
2003	US\$ 2.544.593,00	War Game System
2003	US\$ 2.544.179,00	War Game System
2003	US\$ 3.339.910,75	Anti Ballistic Helmet
2003	US\$ 50.988.775,03	Overhaul KRI Cakra
2006	US\$ 3.398.972,26	Purchase War Game
2006	US\$ 29.920.000,00	6 Helicopters MI 17V-5

Dikutip dari: Makmur Keliat, *The Future Direction of Defense Cooperation*, hal.4

Metode kedua yang dilakukan adalah melalui mekanisme pembelian timbal balik (*counter purchase mechanism*). Mekanisme ini terjadi sebagai ganti dari pembayaran pinjaman Indonesia untuk penyediaan peralatan militer dari Korea Selatan, dengan persetujuan bagi Indonesia untuk menyediakan 8 buah CN-235 (versi militer dan VIP) yang setara dengan nilai uang sekitar US\$ 130 juta untuk Korea Selatan. Mekanisme ini terjadi pula disaat Indonesia yang berminat untuk membeli dua kapal selam milik Korea Selatan dan Korea Selatan tertarik untuk memperoleh 12 unit CN-235- *Special Mission Operation Tactical* dan simulator pesawat CN-235 yang diproduksi PT. Dirgantara Indonesia. Selain itu, Korea Selatan juga menawarkan untuk menjual pesawat latihan lanjutan T-50 dan KO-1 dan Indonesia sendiri menawarkan pembayaran timbal balik-nya dengan dua produk teknologi lanjutan dengan nama simulator CN-235 dan C-130 yang keduanya diproduksi oleh PT. Dirgantara Indonesia.

Metode ketiga adalah melalui produksi berijin atau ijin produksi (*licensed production*). Indonesia telah melakukan kontrak untuk pembelian 4 kapal LPD

(*Landing Platform Dock*) milik Korea Selatan, 2 buah akan dibangun di Korea Selatan dan 2 buah akan dibangun di Indonesia. Diharapkan dengan pembangunan 2 kapal tersebut di Indonesia akan melibatkan sebanyak mungkin produk-produk buatan Indonesia. Metode ini diduga juga akan memfasilitasi proses transfer teknologi dari Korea Selatan ke Indonesia. Maka melalui ini pula yang tersebutkan dalam *Joint Defense Logistic and Industry Committee* (JDLIC) yang dilakukan tiap tahun antara kedua negara menjadi mekanisme yang bermanfaat bagi kedua negara untuk bertukar informasi tentang penyediaan peralatan militer.

Metode keempat adalah melalui mekanisme pembangunan kecakapan (*capacity building mechanism*). Indonesia mengusulkan agar teknisinya dapat dilatih untuk pemeliharaan pesawat di Korea Selatan, mengingat Indonesia memiliki 3 buah pesawat KT-1. Sebaliknya, Indonesia juga melatih teknisi dari Korea Selatan untuk pemeliharaan CN-235 yang telah dibeli oleh Korea Selatan. Perjanjian pelatihan saling menguntungkan (*mutual training*) ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam pemeliharaan pesawat KT-1 dan CN-235 yang dapat dilakukan secara efisien dengan mempekerjakan teknisi lokal.

Selain metode-metode tersebut, Indonesia dalam kerjasamanya dengan Korea Selatan juga menggunakan mekanisme *defence offset* untuk pengadaan peralatan pertahanan. *Defence offset* adalah proses pembelian atau investasi timbal balik yang disepakati oleh produsen atau pemasok persenjataan sebagai imbalan dari kesepakatan pembelian jasa dan barang-barang militer.¹¹ Mekanisme ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1960-an, namun bagi industri pertahanan Indonesia (IPTN, PT PAL dan PT PINDAD) secara efektif baru memakainya pada tahun 1970-an. Alasan mengapa mekanisme ini dilakukan adalah karena kapasitas produksi dari negara produsen persenjataan itu berlebih, sehingga pola yang dibangun untuk menjual produksinya adalah adanya transfer teknologi dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara negara atau perusahaan produsen dengan negara konsumen persenjataan.

¹¹ Muradi, "Praktik *Defence Offset* di Indonesia", dalam *Analisis CSIS*, Vol. 37, No. 3 (September 2008), hal. 362.

Sedangkan dalam kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan, mekanisme ini baru terimplementasi pada tahun 2005. Melalui mekanisme *defence offset* tersebut membawa Korea Selatan yang diwakili oleh perusahaan Daewoo International untuk melakukan *coproduction* dengan PT PAL dari Indonesia dalam pengerjaan Warship LPD.



III. 2. Periode 2006-2009

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai aktifitas diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan pada periode tahun 2006 hingga tahun 2009 yang terklasifikasi dalam tiga bentuk pemahaman diplomasi pertahanan, yaitu yang pertama, *defense diplomacy for confidence building measure* yang dilakukan untuk menunjukkan atau meningkatkan rasa kepercayaan (*trust*) di antara kedua negara; yang kedua, *defense diplomacy for defense capability* yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan kedua negara dan yang ketiga adalah *defense diplomacy for defense industry* yang dilakukan untuk penguatan industri pertahanan negara-negara yang terlibat kerjasama.

III. 2. 1. Defense Diplomacy for Confidence Building Measure (CBM)

Defense Diplomacy for Confidence Building Measure (CBM) dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, yang utamanya dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya sehingga anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak dianggap ancaman bagi negara lain. Namun Indonesia menggunakan diplomasi ini untuk membangun kepercayaan dan menciptakan kerjasama yang luas dengan Korea Selatan, karena hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan dapat dikatakan sebagai hubungan yang meliputi persahabatan dan keinginan bagi keduanya untuk saling melindungi satu sama lain.

Pada tanggal 23 Januari 2006 pemerintah Indonesia dan Korea Selatan yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Kedua Negara, Juwono Sudarsono (Indonesia) dan Yoon Kwan G-ung (Korea Selatan) membuat kesepakatan untuk meningkatkan status komite kerjasama bidang pertahanan di tingkat antar-pemerintahan *Government to Government (G to G)*. Kerjasama bidang pertahanan kedua negara yang selama ini masih bersifat teknis ditingkatkan pada level pemerintah antar pemerintah kedua negara. Dengan peningkatan status tersebut maka kerjasama industri pertahanan kedua negara termasuk kerjasama dengan

BUMN industri strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT PAL Indonesia akan lebih terpadu. Kesepakatan ini terjalin setelah kedua negara yang diwakili oleh Menteri Pertahanan-nya saling melakukan kunjungan dan pembicaraan dalam rangka mempererat kerjasama militer Indonesia dan Korea Selatan, khususnya bidang pengembangan industri pertahanan.

Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa kerjasama militer antara Korea dengan Indonesia sangat penting untuk lebih ditingkatkan mengingat Indonesia memiliki peranan yang strategis di negara-negara Asia.¹² Selain itu dilakukan pula pembahasan tentang keinginan pemerintah RI agar pemerintah Korea segera mempercepat proses penarikan sejumlah suku cadang pesawat tempur TNI Angkatan Udara buatan Amerika Serikat jenis F-5 dan F-16 yang tertahan di Korea akibat embargo. Suku cadang tersebut selama ini diperbaiki dan akan segera dikembalikan oleh PT Samsung Industry, tempat suku cadang tersebut diperbaiki. Dan sejumlah suku cadang tersebut dikembalikan kepada Indonesia setelah dikeluarkannya pencabutan embargo oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia pada November 2005.

Pada tanggal 1 Juni 2007 Indonesia dan Korea Selatan terlibat dalam sebuah pertemuan para menteri dan pejabat tinggi pertahanan bersama perwakilan 24 negara lainnya dalam membahas berbagai isu pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik dalam konferensi keamanan Asia ke-enam di Singapura.¹³ Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai berbagai tantangan keamanan nuklir yang dihadapi kawasan Asia Pasifik saat ini dan di masa mendatang. Dalam konferensi yang juga dikenal dengan "Dialog Shangri-La" itu membahas pula rencana reformasi kebijakan di sektor keamanan untuk menghadapi masalah-masalah Internasional, selain itu pertemuan ini juga membahas pula tentang sejauh mana kemajuan dalam pengamanan perairan kawasan. Selain Indonesia

¹² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *RI-KORSEL Tingkatkan Kerjasama Pertahanan* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7158> diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 19:18 wib.

¹³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Menteri Pertahanan dari 26 Negara Bertemu di Singapura Bahas Keamanan Asia Pasifik* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7805> diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 19:51 wib.

dan Korea Selatan, dialog tentang isu keamanan dan pertahanan itu juga diikuti para menteri dan pejabat tinggi pertahanan dari Australia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Jepang, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Rusia, Singapura (tuan rumah), Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Inggris, Amerika Serikat dan Vietnam.

Pada tanggal 14 Mei 2008,¹⁴ Korea Selatan (Korsel) menawarkan kemitraan strategis bidang pertahanan kepada Indonesia, untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin lama, terutama antara angkatan bersenjata kedua pihak. Topik tersebut menjadi pembahasan dalam rangkaian pertemuan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Korsel Laksamana Jung OK-Keun dengan Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Sumardjono di Jakarta. Korea Selatan menganggap, Indonesia merupakan salah satu negara dan mitra yang sangat strategis di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam mendukung keamanan di Selat Malaka, yang berdampak pada kelangsungan hidup negara-negara kawasan Asia Timur termasuk Korsel. Indonesia telah memainkan peranan penting baik dalam kerangka ASEAN maupun global. Karena itu, Korsel terutama Angkatan Laut Korsel merasa perlu untuk membangun kemitraan strategis yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya TNI AL.

Dalam pertemuan tersebut, Korea Selatan yang diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Korsel Laksamana Jung OK-Keun berharap Indonesia dapat mengembangkan kekuatan TNI AL mengingat luas perairan Indonesia yang sangat besar dan posisinya yang strategis bagi dunia Internasional. Menanggapi harapan Korea Selatan tersebut Indonesia yang diwakili Panglima TNI mengatakan, pengembangan kekuatan TNI AL tetap dilakukan sesuai kemampuan anggaran pemerintah dan seluruh kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) terkait itu juga telah diajukan ke Departemen Pertahanan untuk dikaji lebih lanjut disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.

¹⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Korsel Tawarkan Kemitraan Bidang Pertahanan Pada RI* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8319> pada tanggal 26 November 2010 pukul 20:14 wib.

Kerja sama yang telah dilaksanakan selama ini antara TNI AL dan Angkatan Laut Korea Selatan antara lain *Navy to Navy Talks* (NTNT), meliputi bidang latihan, pendidikan, teknologi, tukar menukar informasi dan kunjungan personel. Pertemuan kedua pemimpin AL ini juga membicarakan peluang kerja sama bidang personel dengan memberi kesempatan personel AL kedua negara mengenyam pendidikan setingkat Sesko (Saling kirim siswa Sesko), serta dijajaki kemungkinan kerja sama latihan secara terjadwal maupun *Passage Exercise*, pengembangan teknologi kapal perang dan latihan tambahan pada saat kunjungan kapal.

Pada tanggal 31 Oktober 2008,¹⁵ TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Korea Selatan (*Republic of Korea Air Force/ROKAF*) sepakat meningkatkan kerja sama, tidak saja dalam pertukaran siswa sekolah staf komando. Kunjungan kehormatan dari Angkatan Udara Korea Selatan ini merupakan ajang untuk meningkatkan kerja sama kedua angkatan udara. selama ini kerja sama angkatan udara kedua negara baru sebatas pertukaran siswa sekolah staf komando TNI AU (Seskoau) dan Sekolah Staf Komando Angkatan Udara Korea Selatan. Kedepannya, akan ditingkatkan kerja sama yang telah ada menjadi lebih luas lagi seperti kemungkinan latihan bersama antara kedua angkatan udara.

Sebelumnya, dalam pertemuan bilateral di Mabes TNI AU Cilangkap, kedua pimpinan angkatan udara tersebut sepakat untuk melakukan pertukaran kunjungan (*exchange visit*) antara pejabat angkatan udara dua negara secara rutin. Pertukaran kunjungan itu, bertujuan untuk saling menjajaki kemungkinan kerja sama apa saja yang bisa dilakukan di masa datang antara kedua angkatan udara. Melalui peninjauan yang rutin tersebut tidak menutup kemungkinan kerja sama yang telah ada dapat ditingkatkan menjadi lebih luas lagi seperti latihan bersama antara angkatan udara kedua negara, seperti yang telah terjadi, pertukaran kunjungan intensif yang dilakukan TNI AU dengan angkatan udara Malaysia,

¹⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *TNI AU-Angkatan Udara Korea Selatan Sepakat Tingkatkan Kerja Sama* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8461> diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 20:21 wib.

Singapura dan Thailand dan kini angkatan udara empat negara telah memiliki agenda rutin latihan bersama secara bilateral.

Pada tanggal 16 Juni 2009,¹⁶ militer Indonesia mengadakan latihan bersama dengan 21 negara, guna meningkatkan kerja sama dan profesionalitas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Latihan bersama dengan sandi "Garuda Shield" 2009 itu, dibuka langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Pusat Pendidikan Infanteri TNI Angkatan Darat Cipatat, Bandung. Kegiatan itu merupakan salah satu kegiatan yang disponsori Komando Militer AS di Asia Pasifik (USPACOM). Latihan bersama tersebut merupakan yang ketiga kali diadakan di Asia. Sebelumnya diadakan di Mongolia dengan sandi "Khan Quest" (2007) dan di Bangladesh dengan sandi "Santi Dhoot" (2008). Layaknya sebuah latihan militer maka "Garuda Shield" diadakan dalam dua tahap yakni geladi posko (16-22 Juni) dan geladi lapang (22-29 Juni). Ke-21 negara yang terlibat antara lain Amerika Serikat, Jepang, Australia, Korea Selatan, Perancis, Jerman, Italia, Singapura, Thailand serta beberapa negara lainnya di Asia.

Latihan tersebut bertujuan meningkatkan solidaritas dalam penyelenggaraan misi PBB terutama di antara negara-negara yang mengerahkan pasukannya dalam misi PBB (*Troop Contribution Country/TCC*). Selain itu, latihan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan kerjasama di antara negara kontribusi pengirim pasukan dalam misi PBB, menyusul perkembangan lingkungan strategis yang makin kompleks. Perkembangan seperti krisis global, pandemi Flu Babi, dan isu keamanan seperti kejahatan lintas negara, terorisme, dan perselisihan perbatasan membutuhkan kerja sama, berbagai persoalan itu mau tidak mau menuntut negara-negara tersebut untuk bekerja sama dalam menghadapinya untuk menciptakan keamanan kawasan terutama di Asia Pasifik. Masing-masing negara peserta, terutama yang berkontribusi dalam pasukan perdamaian PBB dapat menyamakan persepsi, dan pandangan hingga dapat diwujudkan prosedur tetap

¹⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *RI Latihan Militer Bersama 21 Negara* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8841> diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 20:39 wib.

sesuai ketentuan PBB dalam menjalankan misi perdamaianya di beberapa belahan dunia.

III. 2. 2. *Defense Diplomacy for Defense Capability*

Defense diplomacy for defense capability dilakukan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara material, diplomasi ini memainkan peranan penting agar memungkinkan bagi sebuah negara untuk dapat melakukan pembelian senjata bagi kepentingan pengembangan kekuatan pertahanannya dari negara lain. Dalam hal ini, Indonesia terhadap Korea Selatan menggunakan beberapa mekanisme seperti yang telah dilakukan sebelum tahun 2006 dan sebagian besar masih berjalan hingga sekarang dan berlanjut di masa mendatang.

Pada tanggal 16 Mei 2008,¹⁷ TNI menginformasikan bahwa akan melakukan pengkajian mengenai tawaran kapal selam dari Korea Selatan (Korsel), agar sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Pertimbangan tersebut dilakukan karena Republik Korsel termasuk negara industri terkemuka di Asia, khususnya di bidang industri pertahanan dan peralatan militer, dimana negara ini memegang lisensi dari beberapa negara Eropa. Negara ini juga mampu membangun berbagai jenis kapal perang termasuk teknologi kapal selam tipe 209 lisensi dari Jerman yang ditawarkan ke Indonesia. Beberapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL dipasok dari Industri Perkapalan Korea, dimana tiga tahun terakhir, TNI AL telah dipasok dari industri perkapalan Korsel untuk pembuatan kapal rumah sakit, LPD serta *overhaul* kapal selam. Kapal selam yang ditawarkan Korea Selatan kepada Indonesia berupa Kapal selam tipe 209 memiliki bobot 1.285 ton apung dan 1.390 ton tenggelam, serta berdimensi 195,2 x 20,3 x 17,9 meter. Kapal dengan mesin Diesel Electric 4 MTU, 4 Generator serta 4 buah baterai 120 cell, memiliki kecepatan 11 knot saat berada di permukaan dan 21,5 knot di dalam air. Kapal selam ini diawaki 34 orang termasuk enam orang perwira.

¹⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *TNI Kaji Tawaran Kapal Selam Korsel* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8318> diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 20:13 wib.

Menyusul berita penawaran tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2009 Menteri Pertahanan Indonesia Juwono Sudarsono menyatakan secara resmi bahwa kontrak pengadaan dua kapal selam baru untuk TNI-AL ditunda setahun, dari semula 2010 menjadi pada 2011.¹⁸ Juwono Sudarsono mengemukakan, anggaran yang terbatas membuat pihaknya harus melakukan skala prioritas tinggi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Berbagai bencana alam yang melanda negeri ini, mengharuskan pemerintah untuk memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan pada 2009-2010. Terkait itu, meski terjadi kenaikan anggaran pertahanan menjadi Rp40,7 triliun pada 2010, namun Departemen Pertahanan dan Mabes TNI sepakat untuk tidak dulu mengadakan sistem persenjataan pemukul (*strike force*) melainkan pesawat, kapal, dan kendaraan angkut. Pesawat, kapal dan kendaraan angkut sangat dibutuhkan tidak saja untuk mobilitas pasukan TNI ke lokasi bencana tetapi juga untuk mengangkut logistik prajurit, dan bantuan sosial ke lokasi bencana. Jadi, kita tunda dulu alat utama sistem persenjataan strategis seperti kapal selam. Meski penandatanganan kontraknya ditunda, segala proses pengadaannya terus berlanjut hingga saat hari penentuan.

Pada tanggal 7 Desember 2009, Sebanyak 10 unit tank amfibi dengan jenis *Landing Vehicle Track (LVT)-7A1* resmi memperkuat Korps Marinir TNI Angkatan Laut, setelah dihibahkan oleh Pemerintah Korea Selatan kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan 10 unit tank amfibi buatan Amerika Serikat pada 1983 itu dilakukan Duta Besar Korea Selatan untuk RI Kim Ho Young kepada Komandan Korps Marinir TNI Mayjen TNI (Mar) Alfian Baharudin di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ke-10 unit itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dari Korea Selatan dengan menggunakan kapal perang Korea Selatan, *Sel Dokdo*. Dirjen Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Marsekal Muda TNI Erris Herriyanto mengatakan, kedatangan 10 unit tank amfibi itu diharapkan bisa mengisi kekurangan alat utama sistem persenjataan yang selama ini pengadaannya menghadapi kendala anggaran.

¹⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Menhan: Kontrak Pengadaan Kapal Selam Ditunda* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8951> diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 20:49 wib.

Landing Vehicle Track (LVT)-7A1 sekelas dengan tank amfibi PT 76 dan tank amfibi BTR 60 yang sudah dimiliki Indonesia. Tank amfibi LVT-7A1 merupakan hasil modifikasi dari jenis LVT yang dijuluki Alligator. Tank yang hingga kini masih digunakan Marinir Korea Selatan sama dengan yang digunakan dalam serangan ke Malvinas atau Falkland, Perang Teluk, dan Perang Irak. Kerja sama ini berawal dari pembicaraan pada 2007. Saat itu Korea Selatan telah menawarkan LVT-7A1 kepada Indonesia. Namun, karena menunggu izin dari AS, kesepakatan ini baru bisa diwujudkan. Perjanjiannya sebenarnya ada 35 yang disediakan, tetapi belum ada kejelasan, dan yang diberikan kali ini merupakan gelombang pertama. dengan hibah tersebut, maka pihak TNI AL akan mengirimkan 15 personel untuk mengikuti *Maintenance dan Operational Training* yang terdiri atas *Maintenance Training* sebanyak lima personel selama satu bulan dan 10 personel *operasional training*.

Korea Selatan juga memberikan satu paket suku cadang. LVT-7A1 beratnya 22,8 ton, panjang 7,94 meter, lebar 3,27 meter, dan tinggi 3,26 meter. Namun, Ranpur LVT7A1 saat ini berada dibawah Komando Divisi 1 LVT7A1 RDK Marine Coprs di Pohang Korea Selatan.

III. 2. 3. *Defense Diplomacy for Defense Industry*

Defense diplomacy for defense industry dilakukan untuk pembangunan maupun penguatan industri pertahanan suatu negara, selain untuk pembangunan kapabilitas pertahanan, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat kerjasama.

Pada tanggal 14 Mei 2007,¹⁹ Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Slamet Soebijanto di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, menyambut kedatangan kapal perang baru TNI AL, yakni KRI Makassar-590 yang dibuat dan dibeli dari Korea Selatan. KRI Makassar yang merupakan jenis *Landing Platform Dock (LPD)* berlayar dari Korea Selatan itu, selama 18 hari. Kapal yang

¹⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Kapal Perang Baru TNI AL Buatan Korea Selatan Tiba di Surabaya* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7773> diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 19:48 wib.

diproduksi oleh "Daesun Shipbuildings & Engineering CO Ltd" itu, merupakan kapal pertama dari dua kapal jenis LPD yang dipesan TNI AL dari Korea Selatan.

Kapal dengan panjang 122 meter itu dapat mengangkut sekitar 507 personel, 13 kendaraan tempur tank, lima helikopter yang menggunakan teknologi khusus serta sejumlah peralatan militer lainnya. Kapal itu dilengkapi dengan meriam 100 mm, ruang CIC ("Combat Information Center") atau pusat informasi tempur untuk sistem kendali senjata yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk melindungi pendaratan pasukan dan kendaraan tempur serta pengendalian pendaratan helikopter. Kapal itu juga dapat digunakan untuk operasi militer selain perang, yakni operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam serta dibuat sesuai untuk iklim dan perairan Indonesia. KRI dengan bobot 7.800 ton yang dilengkapi dengan dua landasan pendaratan helikopter (helipad) itu, dikomandani oleh Letkol Laut (P) Taat Siswo Sunarto dan diawaki oleh 100 personel, terdiri dari tiga perwira menengah, 12 perwira pertama, 51 bintara dan 34 tamtama. Kontrak pengadaan kapal TNI AL itu dilakukan pada Desember 2004 lalu, berjumlah empat kapal jenis LPD, dengan kesepakatan dua kapal dibangun di Korea Selatan dan dua dibangun di PT PAL Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan Koarmatim Letkol Laut (Kh) Toni Saiful pada tanggal 16 Desember 2009 di Surabaya mengatakan bahwa Sebuah kapal selam dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) TNI Angkatan Laut (AL) dibawa ke Korea Selatan untuk diperbaiki.²⁰ Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Nanggala-402 itu diangkut ke Korea Selatan dengan menggunakan kapal Combi Dock III untuk perbaikan lengkap (*overhaul*).

KRI Nanggala-402 adalah kapal selam kedua dalam jenis kelas cakra setelah kapal selam generasi sebelumnya, KRI Cakra-401. KRI Nanggala termasuk dalam jajaran armada pemukul milik TNI-AL. Sistem penggerak kapal itu adalah motor listrik Siemens jenis "low-speed" yang disalurkan langsung melalui sebuah "shaft" ke baling-baling kapal. Total daya yang dikirim adalah 5.000 shp (shaft horse power), tenaga motor listrik dihasilkan oleh baterai-baterai

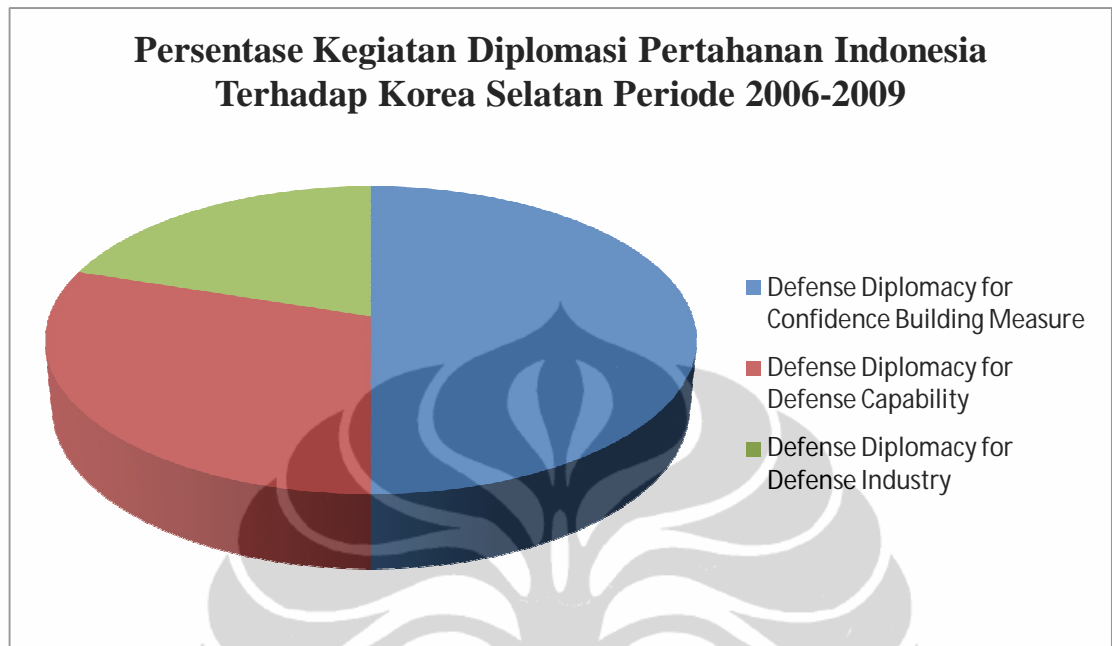
²⁰ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Kapal Selam TNI-AL Diperbaiki di Korea Selatan* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=9021> diakses pada tanggal 26 November 2010 pukul 20:52 wib.

besar yang beratnya sekitar 25 persen dari berat kapal. Tenaga baterai diisi oleh generator yang dijalankan empat unit mesin diesel MTU jenis "supercharged". Kapal selam KRI Nanggala-402 itu memiliki 14 buah senjata torpedo buatan AEG dan dapat diincar melalui periskop buatan Zeiss yang diletakan disamping "snorkel" buatan Maschinenbau Gabler. KRI Nanggala memiliki berat selam 1,395 ton dengan dimensi 59,5 m x 6,3 m x 5,5 m yang digerakkan oleh mesin diesel elektrik, dan empat unit diesel satu shaft yang mampu menghasilkan 4,600 shp. Kapal tersebut diawaki 34 pelaut itu sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 21,5 knot. Sebagai bagian dari armada pemukul, KRI Nanggala merupakan kapal selam tipe 209/1300 yang banyak digunakan Angkatan Laut di dunia.

Sebelumnya, Koarmatim juga telah mengirimkan KRI Cakra-401 ke Korea Selatan untuk diperbaiki. Perangkat teknologinya yang sebelumnya buatan 1970-an kini telah diganti dengan perangkatan teknologi buatan 1990-an. KRI Nanggala buatan Howaldtswerke, Kiel, Jerman Barat 1981 itu pernah terlibat dalam latihan gabungan TNI AL-US Navy.

Dengan melihat berbagai kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan selama periode 2006-2009 dengan menggunakan tiga jenis diplomasi pertahanan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk *defense diplomacy for confidence building measure* menjadi aktifitas diplomasi pertahanan mayoritas yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan yakni 50%, diikuti oleh *defense diplomacy for defense capability* sebesar 30% dan sisanya berupa *defense diplomacy for defense industry* sebanyak 20%. Lihat Grafik 3.1.

Grafik 3.1



Bila dijelaskan dengan rinci mengenai kegiatan masing-masing bentuk diplomasinya maka bisa terlihat seperti Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Kegiatan Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan
Periode 2006-2009

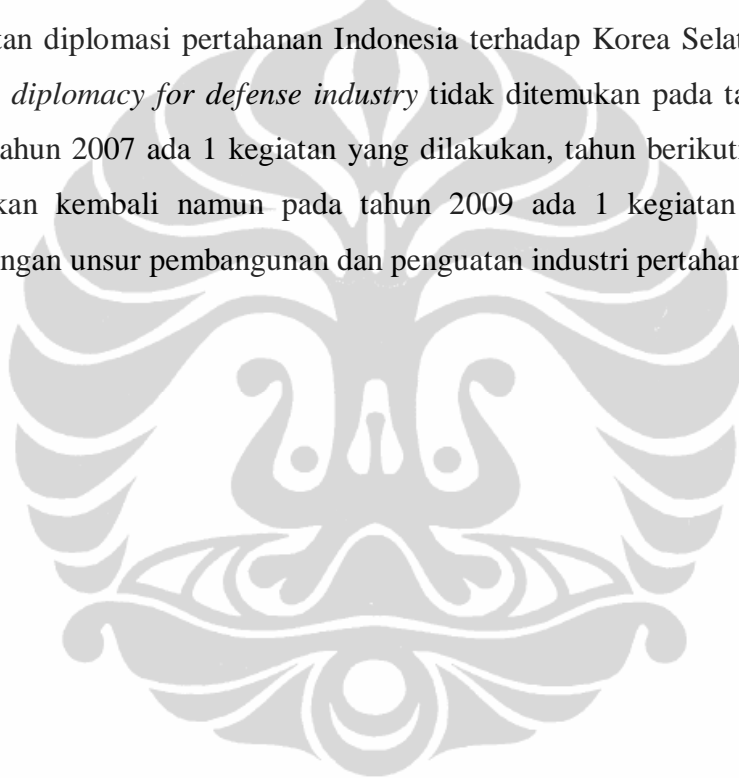
No.	Bentuk Diplomasi Pertahanan	Kegiatan Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan
1.	<i>Defense Diplomacy for Confidence Building Measure</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama bidang pertahanan di tingkat antar-pemerintahan <i>Government to Government</i> - Pertemuan 26 negara (<i>Multilateral Meeting</i>) membahas isu keamanan Asia-Pasifik - Pembicaraan kerjasama kemitraan strategis bidang pertahanan - Pertukaran kunjungan (<i>exchange visit</i>) dan pembicaraan latihan militer bersama - Latihan Militer bersama yang diadakan Indonesia bersama 21 negara termasuk Korea Selatan
2.	<i>Defense Diplomacy for Defense Capability</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian mengenai tawaran kapal selam tipe 209 dari Korea Selatan - Penundaan penandatanganan kontrak pengadaan kapal selam dari Korea Selatan selama 1 tahun - Hibah 10 unit tank amfibi dengan jenis <i>Landing Vehicle Track (LVT)-7A1</i> dari Korea Selatan untuk Indonesia
3.	<i>Defense Diplomacy for Defense Industry</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan hasil kontrak pembelian LPD dari Korea Selatan - <i>Maintenance</i> Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Nanggala-402 ke Korea Selatan

Bila dilihat dari perodesasinya maka aktifitas diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan adalah seperti yang terlihat pada Grafik 3.2. Dalam grafik tersebut dinamika diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan selama periode 2006 hingga 2009 terlihat jelas. Pada tahun 2006 ditemukan 1 kegiatan yang berunsur *defense diplomacy for confidence building measure*, begitu pula pada tahun berikutnya (2007) ditemukan 1 kegiatan, namun

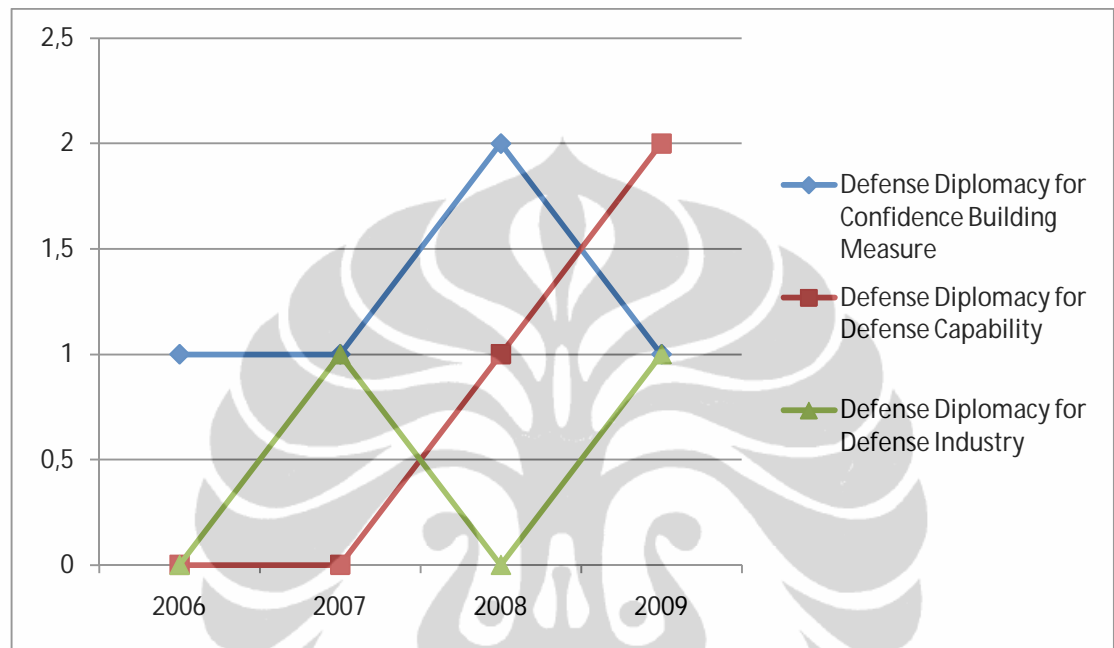
pada tahun 2008 terjadi peningkatan dengan adanya 2 kegiatan dan pada tahun berikutnya (2009) Cuma terjadi 1 kegiatan saja.

Sedangkan untuk *defense diplomacy for defense capability* pada tahun 2006 dan 2007 tidak ditemukan kegiatan diplomasi pertahanan kedua negara, namun pada tahun 2008 ditemukan 1 kegiatan dan pada tahun berikutnya (2009) kegiatan diplomasi pertahanan dengan unsur peningkatan kapabilitas pertahanan ini meningkat dengan 2 kegiatan yang dilakukan kedua negara tersebut.

Kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan dengan unsur *defense diplomacy for defense industry* tidak ditemukan pada tahun 2006, namun pada tahun 2007 ada 1 kegiatan yang dilakukan, tahun berikutnya (2008) tidak ditemukan kembali namun pada tahun 2009 ada 1 kegiatan diplomasi pertahanan dengan unsur pembangunan dan penguatan industri pertahanan.

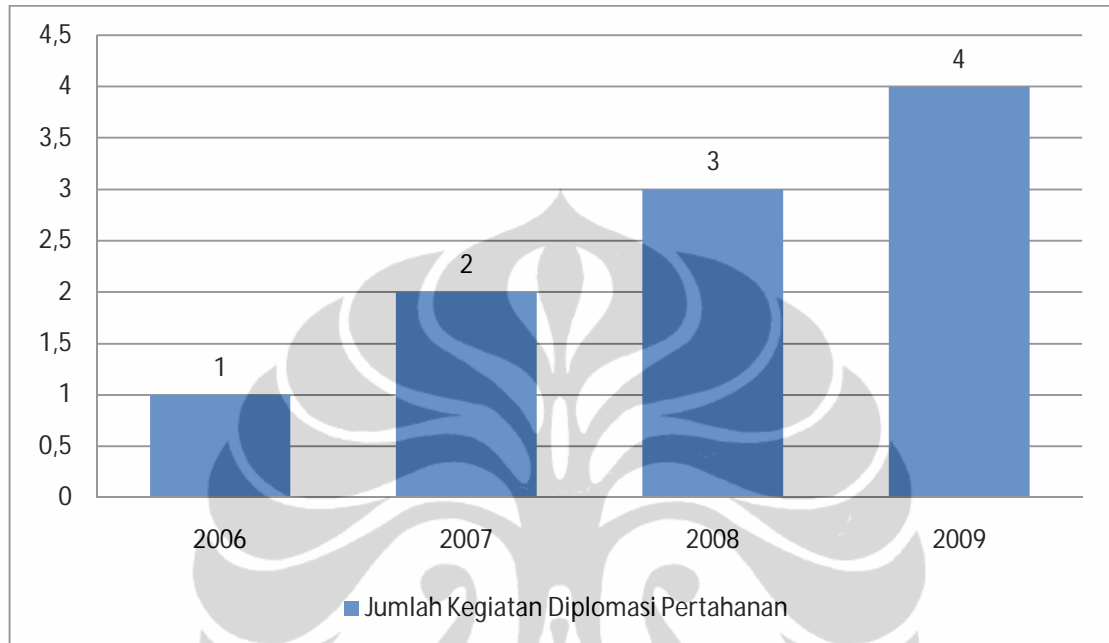


Grafik 3.2
Dinamika Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan
Periode 2006-2009



Dan bila dilihat secara keseluruhan kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan selama kurun waktu 2006 hingga 2009 menunjukkan bahwa tiap tahun jumlah diplomasi yang dilakukan mengalami peningkatan pada tahun 2006 hanya dilakukan 1 kegiatan saja, kemudian tahun 2007 bertambah satu menjadi 2 kegiatan, tahun berikutnya bertambah satu lagi menjadi 3 kegiatan dan pada tahun 2009 bertambah lagi menjadi 4 kegiatan yang dilakukan. Lihat Grafik 3.3.

Grafik 3.3
Jumlah Kegiatan Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan
Periode 2006-2009



Secara garis besar diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan terlihat tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan negara maju pengeksport alat-alat pertahanan lainnya seperti Amerika Serikat, Perancis dan Jerman. Namun, Indonesia melihat berbagai keuntungan lain yang dimiliki Korea Selatan selain kemajuan teknologi yang mengagumkan, kedekatan Korea Selatan dengan Amerika Serikat dianggap Indonesia sebagai keuntungan untuk memperoleh peralatan pertahanan. Mengingat Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat dalam pemenuhan kebutuhan militernya, membuat Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan pertahanannya dengan cara yang lain yang tidak mudah dipolitisasi salah satunya adalah dengan kerjasama dengan Korea Selatan.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan yang telah terjalin lama dalam bentuk persahabatan bukan pertentangan semakin membuat pemenuhan kepentingan pertahanan Indonesia pelan-pelan mengarah kearah yang lebih baik. Faktor kesamaan sebagai negara yang sama-sama pernah terkena

dampak krisis finansial pada tahun 1999 menjadikan kedua negara mencari solusi terbaik dalam pemenuhan kebutuhan pertahanannya. Jadi ditemukan sebuah *win-win solution* dalam hubungan kedua negara ini. Meskipun dalam pemenuhannya sendiri, Indonesia masih mengalami kendala dalam hal anggaran. Setidaknya Indonesia memiliki *loyal partner* dalam usahanya meningkatkan kapabilitas pertahanannya berupa pemberian hibah dan mekanisme pembelian alat-alat militer yang dapat menguntungkan baik bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kerjasama pertahanan yang terjalin dari tahun ke tahun.

Selain itu Indonesia diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi pertemuan kerjasama pertahanan antara Korea Selatan dan Korea Utara,²¹ kerjasama pertahanan tersebut dalam bentuk produksi bersama atau pengembangan lisensi bersama, antara Indonesia, Korea Selatan dan Korea Utara. Kerjasama pertahanan tiga negara tersebut pertama kali diusulkan oleh Korea Selatan melalui Menteri Pertahanan Republik Korea Yoon Kwan G-ung. Indonesia dan Korea Selatan, berharap melalui kerjasama pertahanan tiga negara yakni Indonesia, Korsel dan Korut, maka diharapkan dapat menjadi jalan bagi perdamaian kedua Korea. Baik Indonesia maupun Korea Selatan masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Pemerintah Korea Utara. Jika Korea Utara telah memberikan konfirmasinya, maka langsung diajukan kepada presiden untuk disetujui dan kemungkinan Indonesia akan menjadi fasilitator dalam pertemuan kerjasama pertahanan antara Indonesia, Korea Selatan dan Korea Utara.

Dengan adanya kerjasama tiga negara (trilateral) tersebut, Korea Selatan berharap Indonesia dapat memainkan peranan penting untuk mendinginkan suasana yang masih hangat di antara Korea Selatan dan Korea Utara. Latar belakang Indonesia yang bersikap netral terhadap kedua negara menjadi alasan yang menguntungkan untuk terjadinya hubungan yang lebih baik antara Korea Selatan dan Korea Utara.

²¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Indonesia Fasilitasi Kerjasama Pertahanan Dua Korea* dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7180> diakses pada tanggal 26 November 2010 pada pukul 19:21 wib.

Meskipun Indonesia dan Korea Selatan memiliki ekspektasi masing-masing terhadap partner kerjasamanya namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi kedua negara untuk saling tetap berhubungan baik tapi masih dapat mencapai kepentingan pertahanannya. Hal itulah yang mendasari kedua negara untuk terus meningkatkan segala bentuk kerjasama baik dalam bidang yang bersifat konvensional maupun yang non-konvensional.

